

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

Kode	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses					Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470	Kependudukan								
	1. Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Kependudukan	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
471	Pendaftaran Penduduk								
	1. Identitas Penduduk	Terbatas	V	-		-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

	2. Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia								
	a. Perpindahan Penduduk WNI	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	b. Perpindahan Penduduk WNA dalam Wilayah Indonesia	Terbatas		-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	c. Perpindahan Penduduk WNA Tinggal Sementara	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	d. Daerah Terbelakang	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

								terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
	e. Bedol Desa	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	3. Perpindahan Penduduk Antarnegara								
	a. Penduduk Indonesia Ke luar Negeri	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	b. Orang Asing Tinggal Sementara	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	c. Orang Asing Tinggal	Terbatas	V	-	V	-		Apabila diketahui oleh	Unit Pengolah

	Tetap							pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Terkait
	d. Perpindahan Penduduk Antara Negara di Wilayah Pembatasan antar Negara	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	4. Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan								
	a. Akibat Bencana Alam	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	b. Akibat Kerusakan Sosial	Terbatas	V	-	V		V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

								pemerintahan	
	c. Pendaftaran Pendudukan Daerah Terbelakang	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	d. Pendaftaran Penduduk Rentan	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
472	Pencatatan Sipil								
	1. Kelahiran, Kematian, dan Advokasi	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	2. Perkawinan, Perceraian, dan Advokasi								
	a. Perkawinan Agama Islam	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat	Unit Pengolah Terkait

								mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
	b. Perkawinan Agama Non Islam	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	c. Perceraian Agama Islam	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	d. Perceraian Agama Non Islam	Terbatas	V	-		-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terbatas
	e. Advokasi Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	V	-	V	-		Apabila diketahui oleh pihak yang tidak	Unit Pengolah Terbatas

								berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	
3.	Pengangkatan, Pengakuan, dan Pemisahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akte dan Advokasi	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terbatas
4.	Pencatatan Kewarganegaraan								
	a. Akibat Perkawinan	Terbatas	V		V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	b. Akibat Kelahiran	Terbatas	V	-	V		V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

								pemerintahan	
	c. Non Perkawinan / Non Kelahiran (Peristiwa Penting : Perceraian, Kematian, Perubahan Status Anak Termasuk Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan)	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	d. Naturalisasi	Terbatas		-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	e. Perubahan WNI ke WNA dan /atau Perubahan WNA ke WNI	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
473	Informasi Kependudukan								
	1. Teknologi Informasi	Biasa/Terbatas	V	V	V	V		Apabila diketahui oleh	Unit Pengolah

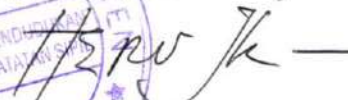
								piak yang tidak berhak, tidak merugikan siapapun	Terkait
	2. Kelembagaan dan Sumber daya Informasi	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	3. Pengolahan Data Kependudukan	Terbatas	V	-	V	-	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	4. Pelayanan Informasi Kependudukan	Biasa/Terbatas	v	V	V	V	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
474	Perkembangan Penduduk								
	1. Pengarahan Kuantitas Penduduk	Terbatas	V	-	V		V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	Unit Pengolah Terkait

								dan fungsi lembaga pemerintahan	
2. Pengembangan Kuantitas Penduduk	Terbatas	V	-	V	-	V		Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
3. Penataan Persebaran Penduduk	Terbatas		-	V	-	V		Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
4. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Terbatas	V	-	V	-	V		Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
5. Pengembangan Wawasan Kependudukan	Biasa/Terbatas	V	V	V	V	V		Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, tidak	Unit Pengolah Terkait

								merugikan siapapun	
475	Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan								
	1. Data Agregat Kependudukan	Biasa/Terbatas	V	V	V	V	V	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah Terkait

Sleman, 31 Desember 2021

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman


HERU JOKO INDARTO, S.H, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19661017 199603 1 001